

## **IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KANTOR DESA MONCOBALANG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA**

**Renita Amelia<sup>1\*</sup>, Ihyani Malik<sup>2</sup>, Samsir Rahim<sup>3</sup>**

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This study purposed to explain the implementation of the Village Financial System Application at the Moncobalang Village Office, Barombong District, Gowa Regency. This study qualitative research with data collection techniques used interview, observation and literature study. The data was analyzed interactively which took place continuously until the data saturated. The results shower that in the implementation of the village financial system, in terms of policy content and policy environment, it had been implemented properly, but there were still some obstacles that occurred, such as a lack of adequate human resources (HR) so that the financial management process was not optimal. In order for the implementation of the siskeudes had run well, the government had to hold regular training and guidance for the siskeudes.*

**Keywords:** *implementation of siskeudes, village financial management*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kantor Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu instrumen wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data yang didapat sudah jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi sistem keuangan desa dari sisi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan sudah terimplementasi dengan baik hanya saja masih ada beberapa kendala yang terjadi seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sehingga proses pengelolaan keuangan menjadi kurang maksimal. Agar implementasi siskeudes dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus mengadakan pelatihan dan bimtek siskeudes secara rutin.

**Kata Kunci:** *implementasi siskeudes, pengelolaan keuangan desa*

---

\* [renitaamelia@gmail.com](mailto:renitaamelia@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Kebijakan yang dapat dilakukan dalam mendukung kemandirian desa salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada desa agar mendapat pembiayaan dari APBN, dalam APBN-P 2015 pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar ± Rp. 20,776 trilliun untuk 74.093 desa yang ada diseluruh Indonesia dan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya, bahkan mencapai lebih dari 1 miliar untuk tiap desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, menyatakan bahwa desa juga mengelola keuangan dari pendapatan asli desa dan berbagai pendapatan lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); bagian hasil retribusi dan pajak Kab/Kota; serta bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kab/Kota.

Peran yang diterima oleh pemerintah desa pastinya disertai dengan pertanggungjawaban yang besar. Karena prioritas dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan, ekonomi, pelayanan social dasar dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan desa yang sesuai dengan aturan. Oleh karena itu,

perlu adanya pengorganisasian yang jelas dalam melaksanakan suatu kebijakan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan keahliannya. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas serta optimalisasi peran pendamping desa yang merupakan bentuk keterbukaan agar kinerja pemerintah desa dapat menjadi lebih baik.

Kenyataan yang terjadi terkait pengelolaan keuangan desa, masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa sebelum diterapkannya siskeudes antara lain: Belum terdapat laporan realisasi mengenai pelaksanaan dari anggaran dana desa secara terperinci dan jelas, hal tersebut dibuktikan dari beberapa dokumen laporan pelaksanaan anggaran Desa di Moncobalang pada tahun 2015. Adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa, serta dilihat dari segi administrasinya pengelolaan keuangan desa belum akuntabel dan beberapa dokumen pengelolaan keuangan belum tersaji dengan rapi. Permasalahan yang terakhir yakni masih banyaknya masyarakat yang terkesan tidak peduli dan tidak tahu mengenai keuangan karena masyarakat belum diberikan

akses untuk mengetahui seputar keuangan desa, sehingga besar kemungkinan berdampak kepada pertumbuhan desa. (Wawancara awal dengan MI Bendahara Desa Moncobalang)

Faktor lain yang menjadi penghambat adalah kurang mendukungnya sumber daya manusia (SDM) yang tidak mampu mengelolah anggaran dengan baik. Hal tersebut menimbulkan banyak terjadi penyimpangan dana desa. Hal itu disampaikan oleh Budi Santoso selaku Direktorat Pembinaan dan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi KPK (2019). <https://mediaindonesia.com/>

Kualitas pelaporan keuangan merupakan pondasi utama bagi kemajuan dalam pemerintahan desa, dalam pengelolaan dana desa dapat terjadi resiko kesalahan baik dalam administratif maupun substansif yang bisa mengakibatkan terjadinya permasalahan-permasalahan hukum, karena tidak dapat dipungkiri kompetensi aparat desa belum memadai dalam hal perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, hal ini diungkapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau sering di singkat BPKP (2015). Untuk mewujudkan tata pengelolaan keuangan desa yang baik

maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Pasal 1, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan dan perencanaan yang baik, maka diharapkan dana yang berasal dari dana desa bisa menunjang program-program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai, Septiarini dan Elisabeth (2016).

Dalam hal pengeloaan keuangan desa maka BPKP mengembangkan sebuah aplikasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola keuangan desa. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk mengimplementasikan aplikasi yang berbasis *online* dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini disebut sistem keuangan desa atau sering di disingkat SISKEUDES

aplikasi ini dikembangkan bersama dengan Permendagri sebagai regulator sehingga penggunaan aplikasi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Implementasi merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses kebijakan, karena tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil di laksanakan.

Wahab (2013) implementasi kebijakan merupakan suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, keputusan peradilan, dan dekrit presiden.

Solichin dalam yahya (2012: 531) implementasi kebijakan merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi birokrasi, yaitu birokrasi pemerintah belum merupakan kesatuan yang efektif, efisien dan berorientasi pada tujuan.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, teori dan model implementasi sangatlah berkaitan. Teori sebagai abstraksi objek atau gagasan, sedangkan model yaitu perwujudan dari teori tersebut.

Model George C.Edward III dalam Mulyono (2015: 68) Ada 4 variabel yang mempengaruhi

implementasi kebijakan yaitu komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap dan Struktur Birokrasi.

Menurut Grindle dalam Agustino (2016: 142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian tujuan yang ingin diraih.

Keberhasilan suatu implementasi menurut Grindle ditentukan oleh tingkat *implementabilty* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari isi dan lingkungan kebijakan Dimana isi kebijakan tersebut sebagai berikut: a) Kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi. b) Manfaat yang dihasilkan. c) Tingkat perubahan yang diinginkan. d) Kedudukan pembuat kebijakan. e) Siapa yang melaksanakan program. f) Sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan konteks kebijakan meliputi: a) Kepentingan, kekuasaan dan strategi actor yang terlibat. b) Karakteristik institusi yang berkuasa. c) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

Penggunaan teori model implementasi dari Merilee S Grindlee akan mempermudah penulis dalam membahas secara menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi aplikasi sistem keuangan desa di kantor desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dengan

melihat 2 dimensi yakni, dimensi yang digunakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksana sesuai dengan apa yang ditentukan dengan merujuk kepada aksi kebijakannya dan apakah tujuan dari kebijakan bisa tercapai. Kemudian dimensi ini diukur dengan melihat 2 faktor tahapan pelaksana dan dampaknya terhadap aparatur desa dan masyarakat. Yang tujuan akhirnya adalah teori ini dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya kebijakan dan apa dampak dan perubahannya terhadap masyarakat dan terkhususnya aparatur desa dalam mengelola keuangan.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi siskeudes di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Pilihan penelitian di Desa Moncobalang dikarenakan desa ini sudah lama menerapkan aplikasi sistem keuangan desa dalam mengelola keuangannya dan peneliti ingin mengetahui tingkat keberhasilan dari implementasi aplikasi ini, apakah membawa perubahan atau tidak.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan tipe

pendekatan deskriptif. Penentuan Informan peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu penentuan orang yang mengerti dan terlibat langsung dan dianggap mengetahui aplikasi siskeudes. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Pengabsahan data dilakukan triangulasi sumber teknik dan waktu lalu dianalisis melalui melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Moncobalang menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. Desa Moncobalang terletak di sebelah selatan Kecamatan Barombong dengan jarak sekitar 7 kilometer. Desa Moncobalang memiliki luas wilayah 3,40 Ha, yang sebagian besar wilayah merupakan lahan pertanian. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara Kabupaten Takalar, Sebelah Timur Kecamatan Bajeng, Sebelah Selatan Desa Biringgala, Sebelah Barat Kabupaten Takalar.

Wilayah desa Moncobalang merupakan daerah dataran dengan curah hujan 237,75 mm dengan suhu 27,125 derajat celcius, dan sangat potensial untuk kondisi iklim khususnya dalam aspek pertanian, dengan mengacu pada

2 musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Adapun Desa Moncobalang secara administrative terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Moncobalang, Dusun Tompobalang, Dan Dusun Karampuang. Jumlah RW 15 dan RT 30.

Desa Moncobalang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Barombong yang memiliki jumlah penduduk relative tinggi peningkatannya. Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Barombong pada tahun 2018 mencapai 40.135 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penduduk di Kecamatan Barombong mengalami pertumbuhan sebesar 0,53%.

Tingkat keberhasilan dari implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kantor Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa akan dianalisa oleh peneliti dengan menggunakan teori model implementasi oleh Merilee S. Grindle. fokus penelitian berdasarkan 2 dimensi penelitian dari teori Implementasi Merilee S. Grindle yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Maka dari penelitian ini diperoleh hasil yang dilakukan oleh peneliti yang kemudian di olah dan dianalisis

sehingga timbul beberapa pertanyaan dengan melakukan metode wawancara kepada beberapa informan yang ditentukan peneliti, yang kemudian dilakukan observasi langsung ke lokasi penelitian. Berikut penjelasan secara rinci dari fokus penelitian:

### **Kepentingan Kelompok Sasaran**

Kepentingan kelompok sasaran menurut Merilee S Grindlee yaitu sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap implementasi. Sasaran kebijakan yang telah ditetapkan pun harus jelas sehingga mempermudah kelompok sasaran yang dituju dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Tujuan yang jelas dalam suatu kebijakan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan dan akan mempermudah pengimplementasiannya, oleh sebab itu kelompok sasaran perlu memahami isi dari kebijakan yang telah ditentukan.

Kelompok sasaran yang dituju dari kebijakan Program Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini adalah Aparat Desa Moncobalang, yaitu bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan yang diimplementasikan memberikan dampak yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan. Aparat desa harus dapat

mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kantor Desa Moncobalang dimaksudkan sebagai salah satu langkah strategis dalam memenuhi pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan arah kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dengan Siskeudes terdiri dari beberapa tahap yakni: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Sasaran kebijakan tersebut dapat mempermudah aparat di di desa Moncobalang dalam mengelola keuangan desa yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, selain itu juga dapat meningkatkan kualitas kinerja aparat desa Moncobalang dalam pengelolaan keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dengan siskeudes merupakan salah satu dari kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan program aplikasi siskeudes di Desa Moncobalang. Kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi berargumen bahwa suatu kebijakan

melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa dengan siskeudes pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018.

### **Tipe Manfaat yang Diperoleh**

Tipe manfaat yang diperoleh menurut Merilee S, Grindle berupaya untuk menunjukkan bahwa di dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh hasil pengimplementasian kepada banyak pelaku lebih mudah di implementasikan dibanding dengan kebijakan yang sedikit manfaatnya. Pemerintah dalam membuat kebijakan baik itu program, peraturan maupun perundang-undangan sebagai landasan hukumnya harus memberikan dampak positif kearah yang lebih baik dan hasil yang bermanfaat dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan yang dikeluarkan tentunya menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang ada.

Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sendiri adalah aplikasi yang memiliki fungsi untuk mempermudah aparat desa dalam mengelola keuangan desa yang transparan, akuntabel dan tertib administrasi. Serta dapat membantu kepala desa dalam menjaga aset desa yang ada, karena semua kekayaan desa dapat direkam dalam aplikasi siskeudes.

Dengan demikian, sebagai kesimpulan dari tanggapan informan-informan mengenai manfaat yang didapatkan dengan adanya aplikasi siskeudes dalam mengelola keuangan desa ialah dengan adanya aplikasi siskeudes maka aparatur desa Moncobalang dalam mengelola keuangan menjadi lebih tertib dan terarah dan dalam pertanggungjawabannya menjadi lebih transparansi kepada masyarakat Moncobalang, sehingga masyarakat dapat mengetahui kemana saja keuangan digunakan oleh aparatur Desa Moncobalang dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik. Hal tersebut juga sejalan dengan asas pengelolaan keuangan yaitu transparansi dan akuntabel.

## **Derajat Perubahan yang Diinginkan**

Merilee S. Grindle, mengemukakan indikator derajat yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang ingin dicapai dari suatu implementasi kebijakan. Kebijakan diharapkan dapat memberikan output yang baik dalam jangka waktu singkat maupun panjang secara teratur.

Kebijakan program aplikasi siskeudes menginginkan perubahan yakni pengelolaan keuangan yang transparansif, akuntabel dan partisipatif serta disiplin anggaran. Serta dapat meningkatkan kinerja dari para aparatur desa dalam mengelola keuangan desa sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pembangunan desa yang lebih baik.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa terkait dengan derajat perubahan yang diinginkan, Pemerintah desa Moncobalang dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan yang efektif, efisien dan disiplin dalam menyusun anggaran sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan dana APBDesa bisa berjalan dengan baik.



## **Letak Pengambilan Keputusan**

Dalam suatu kebijakan, pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam bagian ini harus dijelaskan letak pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan sangat erat kaitannya dengan para *stakeholders* yaitu setiap keputusan yang akan diambil dalam menjalankan kebijakan sebuah program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dalam keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama.

Letak pengambilan keputusan pada kebijakan program aplikasi siskeudes dapat menentukan tercapainya tujuan kebijakan, ketika keputusan yang telah ditetapkan berjalan lancar maka tujuan dari kebijakan dapat pula tercapai dengan baik. Adapun letak pengambilan keputusan dalam kebijakan program aplikasi siskeudes di desa Moncobalang adalah keputusan pada permasalahan yang terjadi dalam pengeoperasian aplikasi siskeudes.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa permasalahan terkait aplikasi siskeudes itu sendiri, masalah pertama yang ditemukan yaitu sering terjadi error

pada sistem data base ataupun memerlukan password baru sehingga tidak dapat menjalankan aplikasi siskeudes secara valid. Dari informasi yang peneliti dapatkan juga masih kurang pelatihan terkait penggunaan aplikasi ini. Hal tersebut membuat bendahara desa selaku operator siskeudes sedikit kesulitan.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa dari pemerintah masih kurang serius memikirkan dampak dalam mengambil keputusan yaitu masih sering terjadi error pada aplikasi siskeudes ini serta minimnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan aplikasi siskeudes yang berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan program siskeudes. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan adanya peninjauan kembali terkait aplikasi siskeudes serta memperkuat sistemnya agar tidak mudah terserang virus. Dan juga rutin mengadakan pelatihan yang diberikan supaya dapat menunjang kapasitas operator siskeudes itu sendiri.

## **Pelaksana Program**

Pelaksana program merupakan suatu hal yang penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program

adalah penggerak atau alat dalam mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Pelaksana ini dapat dikatakan sebagai penyedia dan pemberi pelayanan bagi masyarakat dalam suatu kebijakan.

Pelaksana program merupakan proses dari pelaksanaan suatu program yang harus didukung dengan adanya pelaksana yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang agar mencapai keberhasilan dari suatu kebijakan, maka salah satu unsur dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan yaitu adanya unsur pelaksana organisasi maupun perorangan yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program Aplikasi Siskeudes dibutuhkan perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan program aplikasi siskeudes dapat berjalan dengan lancar.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat bahwa pelaksana program terdiri dari tim dan anggota yang berwenang dalam melaksanakan program aplikasi siskeudes. Untuk mengefektifkan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dengan siskeudes

maka di tunjuk operator siskeudes yang khusus mengoperasikan aplikasi ini yakni bendahara desa dan dibantu oleh aparat desa lainnya serta didampingi khusus oleh pendamping desa dan kecamatan serta diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aparat desa juga turut melibatkan masyarakat secara langsung pada proses perencanaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan untuk kebijakan aplikasi siskeudes dalam mengelola keuangan di Desa Mocobalang ialah aparat desa moncobalang dan beberapa pihak dari dusun, RT, RW dan masyarakat yang dilibatkan dalam proses perencanaan serta melibatkan BPD dalam proses pengawasan hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.

### **Sumberdaya yang Dilibatkan**

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna dalam menyukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar

dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Pelaksanaan aplikasi Keuangan Desa akan berjalan dengan lancar apabila dalam pelaksanaannya dilakukan oleh sumberdaya manusia (SDM) yang mencukupi dan berkualitas.

Pelaksanaan program keuangan desa seharusnya mempunyai kompetensi yang baik dalam pengelolaan keuangan mengingat besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya yang terus meningkat maka didalam menjalankan kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Desa Moncobalang belum mencukupi dalam melakukan tugas dan fungsinya, terutama dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes. Di desa Moncobalang bendahara desa bertindak sebagai operator dalam mengoperasikan siskeudes meskipun kemampuannya juga masih minim, hal tersebut terjadi karena hanya bendahara desa yang mengerti mengenai aplikasi ini.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pelatihan secara khusus sangat diperlukan dalam menunjang

kemampuan bendahara desa Moncobalang dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa dan meminimalisir ketidakkemampuannya dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Karena aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini pada tiap tahunnya semakin susah untuk dipahami apalagi pada tahun ini aplikasi siskeudes sudah menggunakan sistem online yang membutuhkan jaringan sehingga dengan adanya bantuan dari pihak pendamping kecamatan untuk saat ini pengelolaan aplikasi Siskeudes bisa dilaksanakan dengan baik.

Pengembangan sumber daya perangkat Moncobalang selain bertujuan untuk meningkatkan wawasan perangkat desa Moncobalang sebagai abdi negara dan masyarakat dalam ukuran yang seimbang juga meningkatkan profesionalisme agar kinerja aparat desa Moncobalang lebih efektif.

### **Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya

pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Pada indikator ini melihat dari sosialisasi dari program aplikasi siskeudes. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat pada kebijakan aplikasi siskeudes oleh pemerintah kabupaten Gowa merupakan salah satu strategi dalam mencapai tujuan program yaitu pnegelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa sudah bekerja secara maksimal dalam mensosialisasikan program aplikasi Siskeudes ini di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, sehingga proses penerapannya pun terhitung cukup cepat dengan pengimplementasian di 121 Desa dan juga termasuk dari salah satu Kabupaten yang berhasil menjadi percontohan dalam pengelolaan keuangannya.

### **Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa**

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya, pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang telah

dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Karakteristik lembaga dan penguasa yang baik untuk pelaksanaan penerapan aplikasi siskeudes dibutuhkan oleh aparat desa Moncobalang dalam menjalankan aplikasi ini. Pemerintah terkait program siskeudes sebagai lembaga penguasa harus menyediakan sarana bagi aparat desa untuk menyampaikan keluhan terkait dengan aplikasi siskeudes ini.

Dari hasil observasi yang dilakukan di kantor desa Moncobalang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa telah menyediakan sarana penyampaian keluhan, yaitu berupa Klinik Siskeudes di dinas PMD, Kabupaten Gowa juga peneliti melihat bahwa saat ini memiliki satuan tugas (Satgas) Siskeudes mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, dan forum diskusi melalui via sosmed pun sudah berjalan aktif hingga saat ini.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa karakteristik lembaga dan penguasa di Kabupaten Gowa telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam penerapan aplikasi ini. Karakteristik lembaga penguasa di Kabupaten Gowa ini membangun hubungan emosional yang baik dan membangun komunikasi

yang baik antara aparat desa Moncobalang, dengan para satuan tugas siskeudes di Kecamatan.

### **Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana**

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana menurut Merilee S. Grindle menjelaskan hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan yaitu sejauh mana kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Dalam point ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan dari aplikasi sistem keuangan desa.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa aparat desa Moncobalang selaku pelaksana dari penerapan aplikasi siskeudes sudah menerapkan kepatuhan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku. Dan untuk responnya kepada masyarakat sudah baik dan terbukti dengan para aparat memberikan layanan dengan menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada seluruh masyarakat di Desa Moncobalang.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kantor Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa secara umum sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada ditemukan beberapa kendala yang menghambat. Implementasi aplikasi sistem keuangan desa di Kantor Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi yaitu, dari Isi Kebijakan : 1) Kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi. Dalam indikator ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan. 2) Tipe manfaat yang diperoleh. Manfaat dari penerapan aplikasi siskeudes ini sangat dirasakan oleh aparatur dan masyarakat di desa Moncobalang sehingga terbilang pengelolaan keuangan desa di Desa Moncobalang menjadi lebih transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa. 3) Derajat perubahan yang diinginkan. Harapan dari aparat desa moncobalang yakni dapat memanfaatkan dengan baik

aplikasi ini sehingga kinerja dari aparat juga meningkat dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. 4) Letak pengambilan keputusan. Bahwa dari pemerintah daerah belum terlalu serius memikirkan dampak dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan masih seringnya terjadi error dan terserang virus pada aplikasi siskeudes. Oleh karena itu usaha yang dilakukan adalah dengan adanya peninjauan kembali terkait aplikasi siskeudes serta mengadakan pelatihan secara rutin agar dapat menunjang kapasitas operator secara maksimal. 5) Pelaksana program. Pelaksana untuk kebijakan penerapan aplikasi siskeudes adalah aparat desa Moncobalang dan melibatkan RT, RW dan Masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan serta BPD sebagai pengawas. Hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku dengan menerapkan asas partisipatif. 6) Sumber-sumber daya yang digunakan. Mengenai Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Moncobalang dalam mengelola keuangan desa belum memadai dalam hal kemampuan mengoperasikan siskeudes dengan baik dikarenakan kurangnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Lingkungan kebijakan: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Dapat

disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa sudah bekerja secara maksimal dalam mensosialisasikan program aplikasi Siskeudes ini di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, sehingga proses penerapannya pun terhitung cukup cepat. 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, Telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam penerapan aplikasi ini. Karakteristik lembaga penguasa di Kabupaten Gowa ini membangun hubungan emosional yang baik dan membangun komunikasi antara aparat desa Moncobalang, dengan para satuan tugas siskeudes di Kecamatan maupun di daerah. 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, Dalam menerapkan aplikasi siskeudes dinilai sudah baik dengan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai peraturan yang berlaku. Dan untuk responnya kepada masyarakat sudah baik dan terbukti dengan para aparat memberikan layanan dengan menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada seluruh masyarakat di Desa Moncobalang.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat disampaikan sesuai impementasi aplikasi sistem keuangan

desa sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah sebaiknya mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin untuk meningkatkan kemampuan atau skill dari operator siskeudes. 2) Pelatihan yang diadakan tidak hanya sekali setahun. Dan ketika pelatihan yang diberikan pemerintah daerah kurang maksimal maka sebaiknya desa membuat pelatihan khusus untuk membantu meningkatkan skill di bidang IT. 3) Desa Moncobalang sebaiknya memiliki operator yang mengoperasikan siskeudes lebih dari satu orang agar pelaksanaan aplikasi ini menjadi lebih maksimal agar dapat membantu bendahara dalam mengelola keuangan desa. 4) Dalam mengupgrade aplikasi siskeudes setiap tahunnya, pemerintah pusat juga harus memberikan buku panduan agar lebih mudah pada proses pengoperasiannya. 5) BPKP sebaiknya meninjau kembali aplikasi sistem keuangan desa ini agar tidak mudah terserang virus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Pemkab Gowa dinilai memiliki komitmen tinggi dukung implementasi siskeudes*. Diperoleh dari <https://humas.gowakab.go.id/tag/siskeudes>
- Djaunaidi, G.M. dan Almanshur, F. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Indrajit. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Bandung: APTIKOM.
- Malahikal, J.M., Dkk (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kec.Kalawat. Kab.Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.Volume 13. Halaman 578-583
- Mulyadi dan Deddy (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, E.A. dan Sulistyastuti, D.R., (2015). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*